



Buletin Parlementaria



Komisi VII Dorong Buffer Zone Untuk Cegah Dampak Kebakaran



3 Serap Aspirasi
Petani, Puan
Soroti Masalah
Pangan
Indonesia



4 Rachmat Gobel:
Pindah IKN Bukan
Sekadar Pindah
Tempat

Nomor 1237/II/III/2023 • Maret 2023



9 772614 339005



Komisi VII Dorong Buffer Zone Untuk Cegah Dampak Kebakaran



FOTO: GJ/PPPT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman saat diwawancarai usai meninjau Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman mendukung pembuatan *buffer zone* (zona penyangga) hijau dan biru sebagai solusi jangka pendek untuk mencegah terjadinya kebakaran serupa seperti di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Mengenai kebakaran tersebut, pihaknya melihat PT Pertamina telah berkomitmen serius menangani para korban.

"Kami melihat komitmen yang serius dari Pertamina untuk menangani dengan baik para korban yang terkena ledakan dan para warga sekitar yang tempat tinggalnya terdampak peristiwa tersebut. Kedua, tentu harus ada langkah atau target ke depan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, baik jangka pendek, menengah dan panjang terkait Depo Pertamina ini," papar Maman saat meninjau Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Selasa (7/3).

Langkah jangka pendek dan menengah yang menurut Maman menjadi salah satu solusi terbaik adalah pembuatan zona penyangga hijau dan biru. Zona penyangga hijau ini merupakan yang ramah lingkungan yang bisa membatasi area kilang dengan pemukiman warga atau masyarakat. Ditengah-tengah area tersebut dibuat daerah

”

TAPI KARENA ADA PROBLEM SOSIAL DIMANA LOKASI KILANG BERDEKATAN DENGAN MASYARAKAT, TENTU HARUS KITA PIKIRKAN MENCARI TITIK TEMU ANTARA ASPEK OPERASI PERTAMINA DAN MASYARAKAT.

aliran sungai, dan tumbuh-tumbuhan sehingga ramah lingkungan. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut menjadi solusi yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik itu dari sisi teknis maupun sosial.

"Sebetulnya Kami melihatnya dari sisi teknis operasional, tapi karena ada problem sosial dimana lokasi kilang berdekatan dengan masyarakat, tentu harus kita pikirkan mencari titik temu antara aspek operasi Pertamina dan masyarakat. Salah satunya solusi terbaik menurut kami adalah dengan pembuatan *buffer zone* hijau dan biru. *Buffer zone* ini untuk membatasi antara area kilang dengan pemukiman warga," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan itu, Legislator Daerah pemilihan Kalimantan Barat I ini mengungkapkan masih terlalu dini mengambil kesimpulan terkait penyebab kebakaran Depo Pertamina di Plumpang pada Jumat (3/3) lalu. Pasalnya, hal tersebut masih dalam proses investigasi pihak berwenang. Pihaknya masih akan menunggu hasil investigasi dan evaluasi tersebut, untuk kemudian menentukan langkah jangka panjangnya.

Selain itu pihaknya juga memastikan suplai atau distribusi BBM untuk wilayah jabodetabek dan Banten tidak terganggu akibat peristiwa tersebut. "Yang harus dipahami bersama Depo Pertamina di Plumpang ini menjadi salah satu objek vital nasional yang menyuplai BBM untuk daerah Jabodetabek dan Banten. Sehingga harus dipastikan juga proses tersebut tidak terhambat," pungkasnya.

ayu/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Serap Aspirasi Petani, Puan Soroti Masalah Pangan Indonesia



FOTO: EOT/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat berdialog dengan beberapa Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang.

Meninjau operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berdialog dengan sejumlah petani dan nelayan di Sumatera Selatan. Sekitar 700 orang yang terdiri para petani dan nelayan tersebut mengungkapkan kegendahan mereka soal pangan.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyerahkan bantuan. "Bantuan-bantuan yang diberikan untuk membantu bapak dan ibu agar bisa mensejahterakan keluarga dan daerahnya," kata Puan saat berdialog dengan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan diselenggarakan di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang, Jumat (3/3).

Ia meminta anggota DPR dan DPRD dapat setempat berkoordinasi

menyelesaikan persoalan petani di Sumatera Selatan. Kepada petani, Puan mengatakan sudah memantau persoalan harga gabah rendah yang disebabkan karena berbagai faktor, khususnya jelang panen raya ini. DPR RI bersama Pemerintah disebutkan sedang berupaya mencari jalan agar dapat memenuhi harapan semua pihak.

Ia pun berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perhatian kepada Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Sebab solusinya ada di Pemda dan APBD. "Jadi harus ada porsinya. Pemda harus benar-benar mengingat bahwa pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa. Tidak boleh dianggap remeh atau tidak dijadikan prioritas," pungkas Puan.

ts/aha



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa diyah, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonce Sitompul, Zulfrick Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Ruri Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasni Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Rachmat Gobel: Pindah IKN Bukan Sekadar Pindah Tempat

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel menyatakan pemindahan ibukota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukan sekadar pindah tempat dan lokasi. Hal itu ia sampai saat melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, Nishimura Yasutoshi yang berlangsung di kantor menteri tersebut di Jepang, Jumat (3/3).

"Pemindahan IKN bukan soal sekadar tempat dan lokasi, tapi ada hal yang lebih strategis buat masa depan rakyat dan bangsa Indonesia," kata Gobel dalam pertemuan itu. Keduanya membahas berbagai persoalan untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Jepang. Di antaranya membahas tentang IKN dan *proving ground*. Gobel menyampaikan tentang pentingnya IKN buat Indonesia, khususnya untuk Indonesia timur.

Adapun Jepang memiliki pengalaman dalam membangun smart city, suatu kota yang menyeimbangkan udara, air, tanah, dan teknologi. Tiga hari sebelumnya, bersama Menhub Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Gobel mengadakan pertemuan dengan para pengusaha Jepang yang tergabung di Keidanren membahas soal IKN.

Kepada Nishimura, Gobel mengatakan, ada tiga aspek strategis dalam pemindahan IKN ini. Pertama, pemindahan IKN berarti menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih maksimal. "Jika sebelumnya pusat-pusat pertumbuhan dan gravitasi ekonomi

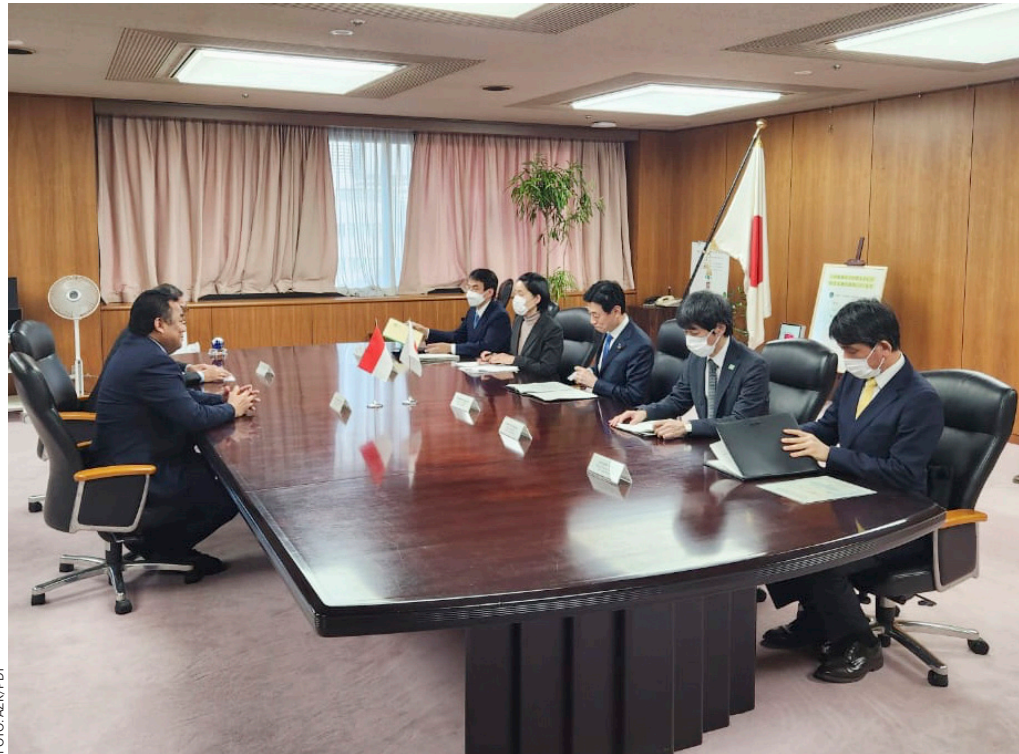


FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel saat melakukan pertemuan (courtesy call) dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Nishimura Yasutoshi di Jepang, Jumat (3/3/2023).

lebih banyak di wilayah barat Indonesia maka dengan pemindahan IKN akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan gravitasi ekonomi baru di wilayah timur," katanya.

Selain itu, katanya, pemindahan IKN ini sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi. "Dengan pemindahan IKN ini maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih berkualitas karena terjadi pemerataan ekonomi," sebut Gobel. Kedua, konsep pembangunan IKN adalah berwawasan lingkungan, hijau, dan bebas emisi. Dimana dunia sedang mengalami perubahan iklim yang menyebabkan suhu udara meningkat dan juga munculnya

beragam jenis penyakit baru karena mutasi bakteri dan virus.

Ketiga, pola pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan serta memastikan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi ini akan menjadi model dan ditiru oleh daerah-daerah lain. "Seperti sudah menjadi kelaziman, setiap hal-hal baik akan mudah menyebar dan digandrungi untuk ditiru. Maka kita akan menyaksikan *multiplier effect* yang luar biasa dari pembangunan IKN ini. Kita akan menyaksikan masa depan Indonesia yang lebih cerah dan inovatif," kata Gobel.

azk/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Legislator Yakin KKB Tidak Berani Bahayakan Pilot Susi Air

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meyakini bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak akan berani membahayakan Pilot Susi Air Kapten Philips Marks Marthens yang disandera. Pasalnya, sandera KKB Papua tersebut merupakan warga negara asing yaitu dari negara Selandia Baru.

"Kami berkeyakinan mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang akan membahayakan jiwa sandera dari luar negeri tersebut," ujarnya dalam keterangan yang diterima media, Senin (1/3). Ia menyebut, kelompok teroris tersebut tidak akan berani melakukan tindakan yang mengancam nyawa Philips dan menyebabkan insiden internasional.

Menurutnya, mereka, hanya berani terhadap sesama anak bangsa. "Saya yakin mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang menyebabkan insiden internasional, berbeda dengan kekejaman terhadap sesama anak bangsa," ucap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah tidak menghiraukan negosiasi yang menguntungkan kelompok tersebut. Salah satunya

”

TENTU TIDAK ADA KOMPROMI SOAL HAL TERSEBUT, APALAGI MENUKAR DENGAN SENJATA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBUNUH BANGSA KITA. MEREKA HARUS SEGERA MENYERAHKAN SANDERA TERSEBUT SEHAT WAL AFIAAT.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi.

ialah permintaan barter antara pilot Susi Air dengan amunisi dan senjata api.

"Tentu tidak ada kompromi soal hal tersebut, apalagi menukar dengan senjata yang akan digunakan untuk membunuh bangsa kita. Mereka harus segera menyerahkan sandera tersebut sehat *wal afiat*," tegasnya.

Oleh karenanya, lanjutnya, pemerintah tidak perlu menanggapi terkait permintaan KKB bermacam-macam tersebut. Lebih baik menurutnya, pemerintah fokus untuk segera melepaskan sandera dengan melakukan operasi penyelamatan Philip Mehrtens tersebut. ➡ **hal/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: RSB/PDT

Komisi II Pertanyakan Kesiapan Pemprov Sumut Hadapi Pemilu 2024

Komisi II DPR RI mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempersiapkan tahapan Pemilu 2024. Berdasarkan informasi yang diterima Komisi II, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi provinsi kedua tertinggi yang memiliki laporan pelanggaran tahapan pemilu di Indonesia.

Untuk mendapatkan penjelasan akan hal tersebut, Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia melakukan Kunjungan Kerja Reses Komisi II ke Kota Medan, Sumatera Utara. Sayangnya, tidak ada Gubernur maupun Wakil Gubernur Pemprov Sumut, ataupun pimpinan KPUD dan Bawaslu Provinsi Sumut dalam pertemuan tersebut. Padahal, tegas Doli, Pemilu 2024 ini menjadi agenda krusial bagi urusan pemerintahan di Indonesia, termasuk Sumatera Utara.

"Ini (juga) kan agenda (Kunker) sudah dijadwalkan lama, kami datang (secara) resmi, semua prosedur sudah dilalui. Kami (akan) evaluasi bersama Menteri dalam Negeri, ini kan (jadi) keterkaitan dengan pembinaan kelembagaan pemerintah daerah," ungkap Doli kepada **Parlementaria** usai memimpin pertemuan tersebut, Kamis (2/3).

Terlepas adanya konflik internal dalam pemerintah daerah, Politisi Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) itu menegaskan penyelesaian masalah persiapan tahapan Pemilu 2024 harus tetap menjadi fokus utama bersama bagi segenap pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga, imbuhnya, Pemilu 2024



Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/3/2023).

harus mengedepankan sinergi dan kolaborasi.

"Setelah (pertemuan) ini, kami akan mengevaluasi kinerja dari pemerintah daerah. Kami (akan membahas) bersama Presiden melalui Menteri Dalam Negeri," pungkas Doli.

Sebagai informasi, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu 2024 serentak kurang dari 1 (satu) tahun. Sejumlah persiapan diupayakan agar Pemilu tersebut berjalan dengan kondusif. Komisi II DPR RI yang membidangi sekaligus mengawasi persiapan Pemilu mengusahakan agar segenap mitra kerja terkait bekerja sesuai dengan perundang-undangan.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI adalah

melakukan Kunjungan Kerja untuk menindaklanjuti sejumlah aspirasi dan aduan masyarakat terkait persiapan tahapan Pemilu 2024 di Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan laporan dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hedy Lugito, terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tebing Tinggi sehingga diputuskan untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPUD.

Tidak hanya itu, sampai saat ini, DKPP telah menerima perkara pelanggaran etik penyelenggara Pemilu sebanyak 35 laporan. "Kalau ini kita biarkan, bisa berimplikasi pada situasi Pemilu nanti. Sebenarnya, Pemilu adalah untuk kita semua, mestinya jadi perhatian semua pihak," tutup Hedy. **ts/rdn**



Ihsan Yunus Soroti Skema Perbantuan ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus menyoroti skema perbantuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab, diketahui, bahwa yang menjadi persoalan adalah gaji dan tunjangan ASN yang diperbantukan ke lembaga penyelenggaraan pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, akan mengikuti gaji di tempat baru tersebut.

Dengan kata lain, tidak mengikuti gaji di instansi atau lembaga di mana mereka berasal.

"Permasalahannya klasik, kita perlu orang yang sesuai dengan lingkup kerjanya, tapi ketika pinjam dari ASN ada masalah tunjangan dan gaji yang memang jauh berbeda antara di Bawaslu dan KPU dibandingkan dengan yang dipinjam, yakni biasanya dari pemerintahan kabupaten," terang Ihsan Yunus kepada **Parlementaria**, usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (17/2).

Untuk itu, Ihsan Yunus meminta adanya kebijakan baru dari pemerintah tentang penggunaan ASN dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. "Inshaallah nanti kita akan mencari jalan keluarnya agar bisa secara SDM bisa terpenuhi, tetapi juga tidak mengurangi gaji dan tunjangan di tempat asalnya," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Secara umum, Ihsan Yunus menyampaikan tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan baik, sesuai jadwal dan tidak menemui permasalahan yang signifikan.

"Paling tadi bicara masalah dapil saja yang memang ada pertumbuhan penduduk di beberapa kabupaten dan ada juga penurunan penduduk di beberapa kabupaten, tapi tadi sudah bisa diselesaikan. Hanya permasalahan nama saja, karena sebarannya sporadis sehingga maunya dikasih nama I, II, III, IV sesuai arah jarum jam tadi. Karena yang sekarang satu di utara, dua di selatan, paling itu saja," ungkap Ihsan Yunus.

Di sisi lain, Ihsan Yunus mengapresiasi penyelesaian mafia tanah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia mengapresiasi semangat juang Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Sulawesi Selatan dalam penyelesaian persoalan mafia tanah di daerah tersebut. "Sekitar 4 hingga 5 kasus yang sudah selesai dan sudah di pengadilan. Artinya Kawan-kawan di BPN memang punya semangat yang sama dengan kita semua untuk memberantas mafia tanah," terang Ihsan Yunus. **eki/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus bersama rombongan Tim saat foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2023).

FOTO: EKI/PDT

Legislator Dorong Pemerintah Segera Bahas RUU Perampasan Aset Bersama DPR

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap pemerintah segera melakukan pembahasan terkait RUU Perampasan Aset bersama DPR. Dirinya menganggap bahwa RUU Perampasan Aset tersebut merupakan produk hukum yang sangat strategis. Sayangnya, pembahasannya berjalan cukup lambat. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Urgensi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana'

"Saya berharap agar pemerintah bisa segera membahasnya bersama DPR agar kemudian ada titik terang seperti apa sebenarnya arah dari rancangan undang-undang ini. Jangan sampai ada kebingungan di tengah publik terkait dengan nasib rancangan undang-undang pasal aset itu," ujar Nasir Djamil di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/2).

Legislator Fraksi PKS itu menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset ini sudah diusulkan sejak tahun 2019. Akan tetapi, prosesnya memakan waktu yang cukup lama, sehingga ia mengistilahkan bahwa jalannya RUU ini seperti siput. Dirinya menjelaskan bahwa salah satu faktor keterlambatan rampungnya RUU ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran terjadi komplikasi hukum dalam penerapannya.

Nasir juga menilai bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset



Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil didampingi pembicara lainnya saat diskusi hadir pada Forum Legislasi dengan tema 'Urgensi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana' di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/2/2023).

nantinya sangat mungkin berdampak pada pengembalian aset negara atas kasus korupsi. Dirinya menyampaikan perihal kompleksnya pengembalian aset atas kasus korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan yang tersembunyi, sehingga sebagian

besar aset-asetnya juga tersembunyi dan sulit dilacak.

Kenyataan tersebut sangat berkorelasi dengan upaya penyelamatan aset-aset negara. Atas pertimbangan itulah, Politisi Fraksi PKS ini menilai adanya urgensi dalam pengesahan RUU Perampasan Aset ini. Dirinya berharap RUU ini akan bersifat paralel dan selaras dengan upaya-upaya mendapatkan kembali aset negara yang diambil oleh para pelaku kejahatan.

"Paling tidak kita punya instrumen hukum untuk menjaga dan kemudian mengembalikan negara berwujud dari aset-aset yang tidak jelas *juntrungan*-nya dan aset-aset yang diambil oleh pelaku-pelaku kejahatan. Itu bagi saya sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar, tutupnya. [adl,ssb/aha](#)

”

RUU PERAMPASAN ASET TERSEBUT MERUPAKAN PRODUK HUKUM YANG SANGAT STRATEGIS. SAYANGNYA, PEMBAHASANNYA BERJALAN CUKUP LAMBAT.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Novita Wijayanti Sambut Baik Subsidi Motor Listrik bagi UMKM

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi kebijakan Pemerintah atas subsidi motor listrik. Diketahui, subsidi motor listrik tersebut diutamakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelanggan listrik 450-900, yang akan efektif diberlakukan pada 20 Maret 2023 mendatang.

"Saya mengapresiasi kebijakan Pemerintah mengenai subsidi motor listrik yang menetapkan subsidi pembelian motor listrik baru berbasis baterai sebesar Rp7 juta per unit," ujar Novita dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Jakarta, Senin (6/3).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini berharap pemberian subsidi dapat memberikan peningkatan produktivitas terutama kepada para pelaku UMKM. "Kita berharap pemberian subsidi tersalurkan tetap sasaran sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha UMKM," tegasnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah resmi memberi subsidi kendaraan listrik, khususnya motor listrik senilai Rp7 juta per unit. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengumumkan subsidi itu ditujukan

untuk 200 ribu unit pembelian motor listrik baru tahun 2023.

"Motor listrik yang mendapatkan (subsidi) adalah yang diproduksi di Indonesia dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen lebih," kata Febri dalam sebuah konferensi pers.

Target penerima bantuan ini diutamakan UMKM, khususnya penerima KUR dan penerima BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) dan juga bisa pelanggan listrik 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM. [pun/rdn](#)

”

**KITA BERHARAP
PEMBERIAN SUBSIDI
TERSALURKAN TETAP
SASARAN SEHINGGA
MEMBERIKAN DAMPAK
POSITIF BAGI PELAKU
USAHA UMKM.**

**Anggota Komisi V DPR RI
Novita Wijayanti.**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: AFR/PDT

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Komisi VI Tekankan Penataan Posisi Depo

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan Pertamina perlu menata ulang dan melakukan evaluasi terhadap posisi depo yang berdekatan dengan pemukiman warga. Hal tersebut berkaitan dengan kejadian kebakaran yang melanda Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang menyebabkan banyak korban disebabkan letaknya yang berdekatan dengan pemukiman warga.

Faisol mengatakan penataan ulang tersebut penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. "Sebaiknya juga mulai membicarakan mendesain, mengevaluasi keberadaan kilang maupun pemukiman di sekitarnya. Saya rasa itu penting untuk

mengantisipasi kemungkinan lain yang mungkin terjadi yang mengakibatkan adanya korban di masa datang," ujarnya kepada awak media, Sabtu (4/3).

Selain itu, Politisi Fraksi PKB ini meminta Pertamina untuk memperhatikan kelayakan

”

SEBAIKNYA JUGA MULAI MEMBICARAKAN MENDESAIN, MENGEVALUASI KEBERADAAN KILANG MAUPUN PEMUKIMAN DI SEKITARNYA.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza.

infrastruktur Depo Pertamina Plumpang. Ia meminta Pertamina melakukan peremajaan infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang "Tidak apa-apa *spending* lebih besar tapi demi keselamatan dan citra Pertamina sebaiknya ini dilakukan semaksimal mungkin," tegasnya.

Senada, Anggota Komisi VI Andre Rosiade juga menyoroti daerah penyangga atau buffer zone Depo Pertamina Plumpang yang sudah banyak dijadikan tempat tinggal warga. Andre mengatakan saat depo tersebut dibangun, kondisinya kawasan sekitar sangat berbeda dengan saat ini. Untuk itu, pemerintah perlu mengkaji apakah perlu merelokasi pemukiman warga atau memindahkan depo ke tempat yang layak.

"Kalau soal relokasi depo saya usulkan kepada Menteri BUMN dan pemerintah, agar depo ini dipindahkan ke Pelindo, ke New Port Pelindo di Priok itu. Saya mendorong, mengusulkan untuk pindah ke sana ke Pelindo supaya Pertamina tidak perlu investasi tanah lagi karena kan tanahnya bisa sewa, bisa dalam bentuk kerja sama tanpa perlu investasi. Jadi Pertamina tidak perlu beli tanah, bisa menggunakan tanah itu dengan sinergi BUMN," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir bicara mengenai bahaya bagi warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kilang minyak hingga listrik. Erick mengatakan ke depan dia akan menata ulang lokasi BUMN yang menjadi kawasan objek vital. [bia/rdn](https://www.bia/rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: OLI/PDT

Rencana Pemberian Insentif dan Subsidi Kendaraan Listrik Harus Terus Diawasi

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono mengungkapkan lembaga-lembaga berwenang seperti BPK dan KPK harus memantau pemberian insentif pembelian motor dan mobil listrik yang menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) rencananya akan mulai berlaku pada Maret 2023 ini. Ia menilai kebijakan pemberian insentif ini tidak signifikan terhadap pengurangan polusi yang berasal dari kendaraan bermotor.

"Oleh karenanya saya berharap kebijakan ini agar transparan. Bahkan ia juga meminta lembaga keuangan negara serta lembaga berwenang lainnya, seperti BPK (badan pemeriksa keuangan) dan KPK (Komisi pemberantasan korupsi) agar memantau pelaksanaan kebijakan ini. Jangan sampai terjadi penyimpangan, sehingga berpotensi mengurangi pendapatan Negara, bahkan bisa merugikan Negara," ujar Sartono saat

dihubungi **Parlementaria**, Jumat (3/3).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyebutkan kebijakan ini bukan konversi yang mengganti kendaraan berbahan bakar minyak atau yang berasal dari fosil ke kendaraan listrik. Namun kebijakan ini menambah kendaraan listrik yang telah diberikan subsidi. Sementara kendaraan berbahan bakar minyak yang masih beredar saat ini jumlahnya sekitar 180 juta unit. Sehingga masih berpotensi memunculkan polusi udara. Bahkan penjualan kendaraan berbahan bakar minyak juga masih terus berlangsung.

"Dengan tidak dikonversikan kendaraan BBM yang jumlahnya

sekitar 180 juta unit ini, maka polusi tetap ada. Kebijakan pemberian insentif atau subsidi pada pembelian motor dan mobil listrik ini pun tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat polusi udara akibat kendaraan bermotor, kecuali kendaraan berbahan fosil yang sudah ada dikonversikan ke kendaraan listrik. Sehingga yang ada di jalan merupakan kendaraan listrik," tambahnya.

Sartono juga menambahkan bahwa sejatinya penggunaan kendaraan listrik juga tidak sepenuhnya non fosil, pasalnya pembangkit energi listrik di Indonesia juga masih didominasi oleh batu bara yang notabene merupakan energi fosil. Meski demikian, ia menegaskan, langkah atau upaya pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca tetap harus dilakukan sebagaimana komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* sehingga akan terwujud target bebas emisi dan bebas jejak karbon. — **ayu/aha**

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono.



Scan QR untuk berita selengkapnya



Foto: oji/pdi

Komisi VIII Apresiasi Kontribusi Seminari bagi Kemerdekaan RI

Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Seminari St. Yohanes Paulus di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kontribusi Pendidikan Sekolah Keagamaan Katolik (Seminari) dalam kemerdekaan RI.

"Kita tahu Seminari dan Katolik di Indonesia memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh nasional yang memberikan satu kontribusi yang kuat bagi NKRI," ujar Ace dalam sambutan saat pertemuan dengan jajaran Pemkab Manggarai Barat dan pengurus yayasan Seminari, di NTT, Sabtu (18/2).

Selain berkontribusi dalam kemerdekaan, Ace juga mengakui

bahwa para alumni seminari memberikan kontribusi besar bagi pembangunan karakter besar bagi pembangunan karakter bangsa, terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

"Salah satunya, misalnya, Presiden Soekarno dulu pernah dibuang ke Ende. Bersama para Romo, dia banyak menulis tentang

”

ALHAMDULILLAH PERLU KITA APRESIASI DI NTT TIDAK ADA KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA. KARENA ITU HARUS KITA PELIHARA DAN KITA PUPUK RASA TOLERANSI KARENA INILAH MODAL KITA MENJADI BANGSA INDONESIA.

keharusan kita memperkuat negara yang kita cintai ini. Karena itu, setelah enam tahun diperjuangkan, Seminari menjadi bagian dari Kemenag, karena sebelumnya berada di bawah kemendikbudristek. Karena kami meyakini agama merupakan nilai kebajikan yang pasti akan menuntun bangsa ini kepada pembinaan karakter pembinaan akhlak," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Karena itu, tegasnya, pendidikan Seminari ini harus diimbangi dengan semangat moderasi beragama. Hal ini dalam rangka untuk menjaga semangat kerukunan beragama di NTT yang telah masuk dalam tiga provinsi terbaik dalam menjaga kerukunan umat beragama.

"Alhamdulillah perlu kita apresiasi di NTT tidak ada konflik antar umat beragama. Karena itu harus kita pelihara dan kita pupuk rasa toleransi karena inilah modal kita menjadi bangsa Indonesia," tutupnya. **rdn**



FOTO: RDN/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily berfoto bersama dengan Anggota Komisi VIII beserta mitra kerja usai melakukan pertemuan, dengan jajaran Pemkab Manggarai Barat dan pengurus Yayasan Seminari, di NTT, Sabtu (18/2/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Umar Bashor Pertanyakan Persiapan Pelaksanaan ibadah haji 2023



FOTO:ARR/PDT

Anggota komisi VIII DPR RI Umar Bashor saat pertemuan kepala badan BPKH beserta jajaran, Sekjen Kemensos dan Asisten Administrasi umum Provinsi Kaltim beserta jajaran, Balikpapan, Jumat (17/2/2023).

Guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih bermutu dan berkualitas, maka melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Anggota komisi VIII DPR RI Umar Bashor mempertanyakan bagaimana kesiapan kanwil dan Kemenag kabupaten kota provinsi Kalimantan, Balikpapan menghadapi pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.

"Secara teknis yang akan dilakukan, sudah ada langkah-langkah konkrit terutama dalam mempersiapkan petugas-petugas yang akan melayani jamaah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, perekrutannya sudah ada tinggal pelatihan-pelatihan," terang Umar usai pertemuan kepala badan BPKH beserta jajaran, Sekjen Kemensos dan Asisten Administrasi umum Provinsi Kaltim beserta jajaran, Balikpapan, Jumat (17/2).

Di sisi lain, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan juga mempertanyakan terkait dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENa)

”

SECARA TEKNIS YANG AKAN DILAKUKAN, SUDAH ADA LANGKAH-LANGKAH KONKRIT TERUTAMA DALAM MEMPERSIAPKAN PETUGAS-PETUGAS YANG AKAN MELAYANI JAMAAH HAJI, BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI ARAB SAUDI, PEREKRUTANNYA SUDAH ADA TINGGAL PELATIHAN-PELATIHAN.

kemensos. "Kami juga ingin melihat sejauh mana implementasi program pena telah berjalan, karena dampak program ini sangat baik yaitu mampu menarik masyarakat keluar dari garis kemiskinan," tutur Umar.

Masih dalam rangkaian acara kegiatan kunjungan kerja reses ke Kaltim, selain pertemuan rapat, komisi VIII DPR bersama dengan kemensos, juga menyerahkan bantuan program Asistensi dan rehabilitasi (ATENSI) kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

Berdasarkan informasi yang diterima Umar, nilai manfaat dari pemberdayaan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus sangat dirasakan. "Dalam kondisi seperti itu mereka lebih senang diberdayakan bukan dibantu seperti bantuan sosial tetapi lebih ingin diberdayakan," tutupnya.

afr/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Eddy Wuryanto Ingin Bali Jadi Kawasan Percontohan Kesehatan melalui KEK Sanur

Anggota Komisi IX DPR RI Eddy Wuryanto menginginkan Provinsi Bali menjadi kawasan percontohan kesehatan bagi daerah lain di Indonesia melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Menurutnya, dengan adanya Rumah Sakit (RS) berstandar internasional tersebut, Bali dapat menjadi percontohan bagi *medical tourism*.

"Artinya, dapat menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya sekadar untuk menikmati kekayaan dan keindahan alam saja namun untuk pengobatan juga," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) itu kepada Parlementaria, usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta jajarannya di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (17/2).

Untuk mendukung terwujudnya hal itu, Eddy menyoroti pentingnya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, hal tersebut penting dipersiapkan dengan baik, seperti halnya dokter dan perawat di Indonesia harus sudah memiliki standar kompetensi Internasional.

"Jadi mari, Pemerintah Provinsi Bali harus benar-benar mempersiapkan SDM kesehatan untuk memenuhi kebutuhan RS Internasional dari dokter, perawat yang ada di Bali dan sekitarnya," tegasnya.

Karena itu, Eddy menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI berharap




FOTO: HNM/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Eddy Wuryanto saat menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta jajarannya di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jumat (17/02/2023).

”

KOMISI IX DPR RI BERHARAP PROVINSI BALI DAPAT MENJADI PERCONTOHAN UNTUK INDIKATOR-INDIKATOR KESEHATAN YANG BAIK. SEPERTI HALNYA, DENGAN TIDAK ADA LAGI ORANG INDONESIA YANG BEPERGIAN KE LUAR NEGERI DENGAN TUJUAN UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN, SEHINGGA TIDAK ADA LAGI DANA KESEHATAN YANG MENGALIR KE LUAR NEGERI.

Provinsi Bali dapat menjadi percontohan untuk indikator-indikator kesehatan yang baik. Seperti halnya, dengan tidak ada lagi orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri dengan tujuan untuk pemeriksaan kesehatan, sehingga tidak ada lagi dana kesehatan yang mengalir ke luar negeri.

Diketahui, KEK Sanur ditetapkan pada bulan Juli 2022 lalu. KEK Sanur merupakan KEK Kesehatan pertama di Indonesia yang mengembangkan fasilitas kesehatan dan pariwisata berkelas internasional, yang ditargetkan mampu merealisasikan investasi sebesar Rp10,2 triliun, dengan harapan mampu menyerap 43.647  [hnm/rdn](https://twitter.com/hnm/rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



PSSI Diwanti-Wanti Jangan Terjebak Dalam Target Prestasi Jangka Pendek

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dibawah kepemimpinan Erick Thohir diharapkan jangan terjebak dalam paradigma etos kerja lama dengan cara pandang jangka pendek. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengingatkan, Ketua PSSI beserta segenap jajaran kepengurusan baru kedepannya harus lebih fokus pada terobosan-terobosan baru dengan peletakan pondasi pokok-pokok transformasi persepakbolaan nasional.

Hal itu ia wanti-wanti saat hadir sebagai narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Harapan Kemajuan Sepak Bola Dengan Nahkoda Baru PSSI' di ruang Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3).

Turut hadir pengamat sepakbola Kesit Handoyo dan hadir secara virtual Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha.

"Sejak lama, Komisi X DPR RI punya *concern* menyangkut soal isu prioritas antara prestasi atau industri yang lebih didahulukan. Dari pengalaman panjang kita, prestasi tidak bisa dicetak dalam waktu sekejap. Ini harus jadi cara pandang baru kita. Jadi, PSSI jangan lagi bekerja dengan cara mengurus bola dengan cara jangka pendek. Oleh karena itu, meletakkan pondasi transformasi perbaikan lebih penting dilakukan oleh Erick Thohir kedepan daripada meletakkan kebijakan yang sifatnya jangka pendek," tegas Politisi Fraksi PKB itu.

Pondasi-pondasi tersebut, utamanya, yaitu terselenggaranya kompetisi yang digelar secara adil, penyelenggaraan kompetisi-kompetisi



Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (tengah) dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan topik 'Harapan Kemajuan Sepak Bola dengan Nahkoda Baru PSSI' di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

untuk pembinaan pesepakbola muda dengan berkualitas yang berjenjang dari level akar rumput hingga pembenahan aspek wasit. "Saya membayangkan masih butuh waktu

”

SAYA MEMBAYANGKAN MASIH BUTUH WAKTU 15 TAHUN KEDEPAN UNTUK MENCAPAI PRESTASI. KARENA WAKTU MASIH PANJANG UNTUK BERPRESTASI, MAKA YANG TERBAIK BAGI ERICK THOHIR ADALAH MELETAKKAN PONDASI-PONDASI KEBIJAKAN YANG TRANSFORMATIF BAGI MASA DEPAN PENGELOLAAN SEPAKBOLA KITA.

15 tahun kedepan untuk mencapai prestasi. Karena waktu masih panjang untuk berprestasi, maka yang terbaik bagi Erick Thohir adalah meletakkan pondasi-pondasi kebijakan yang transformatif bagi masa depan pengelolaan sepakbola kita," tegas Syaiful Huda.

Sementara itu, pengamat sepakbola Kesit Handoyo menyambut dengan optimisme kepengurusan PSSI baru dibawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terpilih. "Saya melihat latar belakang Erick Thohir sangat mumpuni, dia memang sangat dikenal luas di dunia olahraga walaupun basisnya di dunia olahraga basket. Namun, ketika kemudian menjadi Presiden Inter Milan terlihat pengalamannya di dunia sepakbola level Eropa. Bahkan sebelumnya, Beliau pernah di balik layar kepengurusan Persija. Jadi secara figur apa yang dimiliki Erick Thohir ini sangat mumpuni," paparnya.

pun/aha

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Komisi XI Pastikan KUR bagi Pengusaha Mikro Diberikan Tanpa Agunan

Implementasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat ini masih mengalami beberapa hambatan di lapangan dan belum sesuai seperti yang diharapkan. Utamanya terkait KUR yang masuk kriteria pinjaman dengan nominal Rp25 juta ke bawah bagi pengusaha mikro yang semestinya dapat diberikan tanpa memerlukan agunan.

Akan tetapi, pada, prakteknya masih ditemui pelaksanaan yang berbeda dari aturan yang telah disepakati. Demikian hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Amir Uskara di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (2/3).

"Terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang ada beberapa hal yang sering menjadi hambatan di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita sepakati, terutama KUR bagi pengusaha mikro yang harusnya tanpa agunan ini masih dibebankan oleh perbankan tingkat bawah untuk menyiapkan agunan. (Persoalan) KUR untuk pengusaha mikro ini juga banyak kami dapatkan selama kami keliling di seluruh daerah di Indonesia, dimana ternyata KUR ini masih belum mencapai dari apa yang kita harapkan," ucap Amir Uskara.

Padahal, lanjut Amir, keberadaan KUR untuk usaha mikro ini ditujukan agar dapat menambah UMKM baru yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di daerah masing-masing. "Untuk KUR yang ada saat ini



FOTO: MUN/PDT

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Amir Uskara saat diwawancarai usai agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (2/3/2023). Foto: Dep/Pdt

juga kami soroti karena ternyata banyak penerima KUR itu bergulir di satu UMKM saja. Hal itu mungkin perbankan ingin bermain aman terhadap dana KUR itu, sehingga mereka gulirkan di tempat yang sama. Karena yang kita harapkan KUR ini betul-betul bisa menyebar secara maksimal ke UMKM yang ada di seluruh Indonesia sehingga mereka bisa bergerak dengan bebas untuk bisa meningkatkan usaha mereka," tandas Politisi PPP itu.

Dikatakannya, terkait Kredit Usaha Rakyat ini sebenarnya sudah disepakati bahwa ada jaminan dari pihak asuransi yakni Jamkrindo dan Askkrindo. Beban bank sebenarnya hanya 30 persen dari beban yang

ada. Artinya jika ada keterlambatan atau masalah terkait dengan pembiayaan KUR ini sebenarnya porsi beban bank hanya 30 persen, sedangkan yang lainnya sudah dijamin oleh asuransi.

"Oleh karenanya hal ini perlu kita dorong agar perbankan bisa memaksimalkan. Jangan terkesan hanya ingin bersikap aman dari pihak perbankannya. Yang kita harapkan adalah bagaimana KUR ini betul-betul bisa menggerakkan ekonomi masyarakat dari sisi UMKM yang tersebar di seluruh daerah," kata Amir.

dep/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pembiayaan Bank Himbara di Sulsel Pasca Covid Terserap Maksimal

Anggota komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah mengatakan perkembangan pembiayaan Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI) secara umum prospeknya baik. Namun ia meminta agar manajemen bank tetap harus mendorong pertumbuhan ekonomi meski pasca pandemi ada kecenderungan belum sepenuhnya stabil.

"Tadi mitra kita sudah menyampaikan dari mulai global sampai detail ke provinsi terkait pembiayaan himbara. Bahwa Bank Mandiri, BRI, BTN bahkan BNI secara umum baik prospeknya cuma, kita memang tetap perlu menekankan karena pasca covid ini dan juga kita masih dianggap menghadapi Resesi," jelas Ela kepada **Parlementaria** disela-sela pertemuan dengan mitra kerja Komisi XI DPR RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/3).

Ela sapaan akrabnya mengatakan kerja sama yang baik antara Himbara dengan Jamkrindo dan Askrido terbukti dari hasil serapan UMKM dan KUR 2022 cukup terserap 0,7 persen, menandakan pertumbuhan ekonomi cepat pulih. Ada yg menarik Legislatif Dapil Lampung II ini yaitu angka pengangguran menurun tetapi angka kemiskinan stagnan. "Nah ini harus kita perhatikan apakah memang kebijakan Pemda dengan proses investasi, seharusnya dengan berkurangnya



Anggota komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah saat pertemuan dengan mitra kerja Komisi XI DPR RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/3/2023).

FOTO: MRV/PDI

”

BAHWA KEMISKINAN TETAP STAGNAN TIDAK BERGERAK DALAM ANGKA YANG MEMANG DITENTUKAN OLEH MEREKA (PEMDA SULSEL) NAH INI KITA LIHAT PENYERAPAN KERJANYA DALAM SEKTOR APA? APAKAH MEMANG YANG INVESTASINYA MENYERAP MODAL TINGGI TETAPI TIDAK BERDAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN ...

pengangguran otomatis tingkat kemiskinan menurun," sebutnya.

Terakhir Ela menegaskan apapun kondisinya pihaknya mendorong sektor riil harus dikembangkan guna berdampak pada berkurang pengangguran serta diiringi dengan kesejahteraan masyarakat. "Bahwa kemiskinan tetap stagnan tidak bergerak dalam angka yang memang ditentukan oleh mereka (Pemda Sulsel) nah ini kita lihat penyerapan kerjanya dalam sektor apa? Apakah memang yang investasinya menyerap modal tinggi tetapi tidak berdampak terhadap lingkungan dan masyarakatnya tentunya apapun kondisinya kami mendorong sektor riil ini juga harus dikembangkan," imbuhnya. **mri/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi XI Tekankan Urgensi Literasi Keuangan pada Masyarakat

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melakukan pemberantasan terhadap praktik pinjaman *online* ilegal (pinjol) serta investasi bodong di Indonesia. Menurutnya, kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum sudah signifikan dan membuahkan hasil yang baik dengan berkurangnya platform pinjol yang beredar di masyarakat.

Namun demikian, Fathan melihat persoalan mengenai belum

tercapainya literasi keuangan yang baik di masyarakat masih harus menjadi perhatian bersama, tak hanya Pemerintah namun seluruh pihak. Ia menyebut masih maraknya masyarakat yang terjerat dan tertipu pinjol ilegal serta investasi bodong perlu menjadi catatan bagi para pemangku kepentingan dan *stakeholder* untuk menemukan solusi konkret atas persoalan tersebut.

"Literasi keuangan yang masih sangat rendah, inklusi keuangan yang masih sangat rendah serta masih muncul pinjol ilegal dan investasi bodong. Saya kira secara umum atas hal itu ada beberapa hal yang harus kita kerjakan bersama," ucap Politisi

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu saat dimintai keterangannya usai pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan, OJK, Bank dan *stakeholder* di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/3).

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming pinjol ilegal dan investasi bodong serta belum memahami resiko yang akan terjadi di belakang akan menambah deretan korban dari pinjol dan investasi bodong. Hal itu pun mutlak memerlukan penanganan serius pihak terkait untuk secara masif dan kontinu mengedukasi masyarakat akan urgensi dari literasi keuangan.

Ia tak memungkiri bahwa rumitnya syarat pengajuan kredit di Himbara turut menjadi faktor yang memicu masyarakat beralih ke pinjol karena iming-iming kemudahan yang ditawarkan. "Karena memang dia (pinjol) akan dengan segala cara, (kirim) *whatsapp* kita, SMS kita, telepon untuk memberikan penawaran-penawaran yang menggiurkan. Sehingga, selama konsumen tidak cerdas, dan tidak mengerti apa itu investasi maka akan terus terjebak dalam lingkaran tersebut," jelasnya.


Atas hal itu, ia pun menegaskan bahwa Komisi XI DPR akan terus berkomitmen dan mendorong OJK serta pihak terkait lainnya untuk bersama mengentaskan praktik pinjol ilegal dan investasi bodong. Serta memberi pemahaman akan urgensi dari literasi keuangan kepada masyarakat.  [srw/aha](#)



FOTO: SRW/PDT

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi saat pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan, OJK, Bank dan *stakeholder* di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/3/2023).



Banggaw Beri Sejumlah Catatan, Dukung Menkeu ‘Bersih-bersih’ di Ditjen Pajak

Ditjen Pajak sedang menjadi sorotan. Bermula dari kasus kekerasan yang dilakukan anak salah satu mantan petinggi di Ditjen Pajak hingga berujung pada penyelidikan oleh KPK dan PPATK karena diduga ada ketidakwajaran aliran dan kekayaan. Ketua Badan Anggaran, M.H. Said Abdullah mengatakan bahkan ini merupakan kesempatan bagi Menkeu untuk melakukan pembenahan, seraya memberikan beberapa catatan.

“Saya kira dari kasus RAT ini kita semua, termasuk Ibu Menteri Keuangan mendapatkan *blessing in disguise*. Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk berbenah, membersihkan Kementerian Keuangan dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria** pada Rabu (8/3).

Said meyakini bahwa ada banyak talenta insan pajak yang berintegritas, bisa memegang amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugas. Menurutnya diperlukan peluang untuk mengembangkan potensi mereka. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah yang dipilih Menkeu dengan melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK yang didukung oleh PPATK untuk melakukan ‘bersih-bersih’ di Instansi yang dipimpinnya, khususnya Ditjen Pajak.

“Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin



FOTO: IKA/PDT

Ketua Badan Anggaran, M.H. Said Abdullah.

hal ini terkuak dan ditindaklanjuti. Sekali lagi kita dorong dan dukung Menteri Keuangan lakukan bersih-bersih, walaupun itu pahit, namun kedepan, langkah Sri Mulyani ini akan makin memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak,” ujarnya

Said meminta adanya *whistleblowing system* di Kementerian Keuangan. Ditambahkannya, jika sistem tersebut sudah ada namun belum

berjalan optimal maka Menkeu dapat menjadi pelopor perbaikan sistem. Menurutnya langkah ini akan membuat insan pajak berpikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang. Ia berharap Kemenkeu membuka partisipasi masyarakat secara luas dalam pengawasan.

“Buka partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap pegawai pajak. Termasuk tokoh-tokoh profesional dalam upaya memperbaiki *governance* Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Langkah ini akan memulihkan kepercayaan *stakeholder* strategis terhadap Ditjen Pajak. Kita perlu apresiasi langkah Menteri Keuangan yang mengundang segenap tokoh-tokoh beberapa saat lalu untuk mendapatkan insight yang beragam dalam upaya membenahi Ditjen Pajak,” tambahnya.

uc/aha



BUKA PARTISIPASI YANG LUAS KEPADA MASYARAKAT UNTUK TERLIBAT MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEGAWAI PAJAK.

Scan QR untuk berita selengkapny



BURT Minta Tingkatkan Kemampuan dan Maksimalkan Setiap Platform Pemberitaan

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso meminta agar setiap personil di Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Medtaksos) Biro Pemberitaan Parlemen untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam mengelola setiap platform pemberitaan parlemen. Hal ini menurutnya, guna menjawab perkembangan teknologi informasi saat ini yang mengharuskan untuk terus relevan zaman.

"Workshop yang diadakan selama tiga hari ini merupakan salah satu

cara kita untuk mengembangkan kompetensi Bagian Media Cetak, Media Sosial, dan Analisis Media dalam meningkatkan kualitas pemberitaan DPR RI," jelas ABS sapaan akrabnya saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Workshop Pengelolaan Pemberitaan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/3).

Menurutnya, dengan diadakannya workshop yang melibatkan tiga subbagian di Bagian Medtaksos ini, diharapkan bisa terjalin sinergitas yang kuat antar subbagian dan kemudian dapat

memaksimalkan setiap platform media pemberitaan yang dimiliki oleh DPR RI.

"Sinergi ketiga sub bagian (Medtakweb, Medsos dan Analisis Media) akan menjadikan DPR RI semakin kuat. Memang benar, secara kasat mata teman-teman bekerja dengan platformnya masing-masing. Namun di balik semua itu, platform-platform tersebut bekerja membentuk sebuah orkestrasi yang mampu menjadikan DPR kuat di mata rakyat," terang ABS.

Menurut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, berawal dari strategi komunikasi publik yang baik dan dieksekusi secara baik oleh SDM yang ada, tak menutup kemungkinan DPR akan menjadi lembaga terbaik pada masa yang akan datang.

Di akhir penyampaian, ABS berharap setelah adanya workshop ini segenap SDM yang ada di Biro Pemberitaan Parlemen, khususnya Bagian Medtaksos memiliki keseragaman pemikiran akan tugas dan fungsinya sebagai sistem pendukung kedewanan, responsif dan adaptif terhadap situasi kekinian, tak hanya terhadap isu-isu aktual, melainkan juga terhadap perkembangan teknologi terkini.

"Output seperti inilah yang saya harapkan. SDM kita, saya harapkan mampu mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang kreatif, komunikatif, serta berkompetensi, mampu berorganisasi dan berkomunikasi dengan berbagai stakeholder tanpa meninggalkan identitas institusi kita," tutupnya.

 we/rdn



FOTO: JKA/PDT

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat membuka Workshop Pengelolaan Pemberitaan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/3/2023).



Diskusi Isu Myanmar Bersama APHR, Gilang Percaya Indonesia Bisa Tunjukkan Solidaritas

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez

mengapresiasi dan merasa sangat senang dengan kehadiran *Asian Parliamentary for Human Rights* (APHR) dan juga anggota *International Parliamentary Inquiry on Myanmar* (IPI) yang datang ke DPR RI. Sebab menurutnya, sebagai anggota BKSAP, sudah tugas bagi BKSAP untuk turut berperan dan bekerjasama dengan parlemen lainnya yang ada di luar negeri guna menyelesaikan isu yang hadir.

"Kami percaya bahwa dengan adanya anggota parlemen lain kita juga bisa menunjukkan solidaritas sama anggota IPI lain terlepas seperti bidang politik kita," ujarnya dalam konferensi pers usai melakukan kegiatan 'Roundtable Discussion on the Myanmar Crisis and ASEAN Issues and the Role of Indonesia and Parliamentarians' di Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (3/3).

Lebih lanjut dirinya menilai, saat ini negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama. Salah satu isu yang paling ramai adalah isu krisis di Myanmar. Ia menjelaskan, isu tersebut mempengaruhi anggota parlemen dalam politisi lainnya. Sehingga dalam diskusi tertutup yang diselenggarakan hari ini, bertujuan untuk menemukan solusi sehingga demokrasi di negara tersebut dapat berdiri kembali.

"Menurut data yang kita dapat sampai hingga tanggal 31 Desember ini sebesar 80 anggota parlemen yang



Foto: OLI/PDR

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez saat konferensi pers usai melakukan kegiatan 'Roundtable Discussion on the Myanmar Crisis and ASEAN Issues and the Role of Indonesia and Parliamentarians' di Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

masih ditahan. Sekarang ada sekitar 92 ada 70 lebih laki-laki dan lebih dari belasan perempuan. Namun itu hanyalah salah satu aspek krisis yang mempengaruhi seluruh negara," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Anggota DPR RI Mercy Chriesty sekaligus anggota APHR menjelaskan

”

KAMI PERCAYA BAHWA DENGAN ADANYA ANGGOTA PARLEMEN LAIN KITA JUGA BISA MENUNJUKKAN SOLIDARITAS SAMA ANGGOTA IPI LAIN TERLEPAS SEPERTI BIDANG POLITIK KITA.

bahwa sejak adanya kudeta militer pada Februari 2021, masyarakat Myanmar mengalami berbagai macam kasus pelanggaran HAM yang cukup berat dan sifatnya sangat sistemik dari waktu ke waktu. Sehingga menurutnya, saat ini masyarakat Myanmar membutuhkan dukungan semua pihak, baik itu komunitas keluarga besar ASEAN maupun dunia internasional.

"Harapan kami bahwa apa yang akan kami bicarakan dalam baik diskusi ruang tamu maupun dalam jumpa pers hari ini tidak sekedar pernyataan. Tetapi ini bisa menjadi gerakan sosial kita bersama sebagai bagian dari masyarakat ASEAN untuk bersama-sama Bergerak bersama memperkuat gerakan kita mengangkat isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan isu-isu yang berkaitan dengan demokratisasi di kawasan ASEAN," ungkap Mercy. ftn,hal/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Rentan Korupsi, Pendanaan Parpol Perlu Pengawasan Ketat

Biaya politik yang tinggi selalu menimbulkan celah untuk praktik korupsi. Lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap pembiayaan politik, dana kampanye, serta donasi dari pihak ketiga dinilai menjadi akar permasalahan korupsi di banyak negara. Karena itu dibutuhkan pengawasan ketat dari segala lini dalam upaya memerangi korupsi.

Hal ini mengemuka dalam agenda sesi pertama Konferensi dan Sidang Umum SEAPAC yang bertajuk "Menangani Akar Korupsi Politik di Asia Tenggara: Peran Parlemen dalam Mengatur dan Mengawasi *Political Finance*", Jakarta, Senin (27/2). Diskusi dimoderatori Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana.

Adapun beberapa narasumber yang dihadirkan yaitu Prof Adam Graycar (Profesor Kebijakan Publik/Direktur *Stretton Institute, University of Adelaide*), Dr. Bridget Welsh (Peneliti Kehormatan, *University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia*), dan Dr Andreas Ufen (Peneliti Senior, *German Institute for Global Area Studies*).

Putu menuturkan dua tema penting pada konferensi SEAPAC yaitu persoalan politik dan pembiayaan di Indonesia. Dalam pertemuan itu, semua delegasi negara ASEAN menyampaikan pengalamannya memberantas korupsi. Terungkap juga beberapa negara di Kawasan ASEAN memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang rendah sehingga menempatkannya dalam deretan Negara Paling Korup.

Adapun negara terkorup nomor satu di Asia Tenggara adalah Myanmar, diikuti Kamboja, Laos, Filipina dan



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana dalam agenda sesi pertama Konferensi dan Sidang Umum SEAPAC yang bertajuk "Menangani Akar Korupsi Politik di Asia Tenggara: Peran Parlemen dalam Mengatur dan Mengawasi *Political Finance*", Jakarta, Senin (27/2/2022).

Indonesia. Sementara Singapura menjadi negara paling minim korupsi di Asia Tenggara, dengan skor IPK 83. Skor ini juga menempatkan Singapura di peringkat ke-5 terbaik global pada 2022. "Memang targetnya stop korupsi. Tapi pertarungan melawan korupsi ini dalam artian harus terus dilakukan,

”

KALAU KITA BERBICARA PARLEMEN LAWAN KORUPSI, MAKA BERBICARA BAGAIMANA KITA BERTINDAK BERSAMA. MUNGKIN HASILNYA DALAM WAKTU PENDEK AGAK SULIT, TETAPI KITA BISA BELAJAR DARI NEGARA NEGARA YANG SUDAH BERHASIL SEPERTI SINGAPURA.

karena terjadi di segala bidang. Dan di politik sangat rentan," jelas Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR tersebut.

Lebih lanjut, Putu Supadma menyampaikan korupsi merupakan ancaman serius dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam akselerasi ekonomi hijau. Ia berharap, melalui konferensi internasional ini menghasilkan diskusi yang bermanfaat untuk memperkuat sistem legislasi anti korupsi, agar dapat menjawab tantangan-tantangan politik di masa kini dan mendatang.

"Kalau kita berbicara parlemen lawan korupsi, maka berbicara bagaimana kita bertindak bersama. Mungkin hasilnya dalam waktu pendek agak sulit, tetapi kita bisa belajar dari negara negara yang sudah berhasil seperti Singapura. Nah, forum-forum seperti ini yang bisa kita lakukan untuk saling berbagi. Karena jika korupsi terus terjadi, maka akan merugikan demokrasi kita," pungkas Putu Supadma. **ann/aha**



Perpustakaan DPR RI Jadi Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan



FOTO: JKA/PDT

Plt Deputy Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini mewakili DPR RI saat menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional atas prestasinya menjadikan Perpustakaan DPR RI sebagai Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan di Jakarta, Senin (6/3/2023).

DPR RI menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional atas prestasinya menjadikan Perpustakaan DPR RI sebagai Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan. Penghargaan ini diterima oleh Suprihartini selaku Plt Deputy Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2023 yang diadakan di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (6/3).

"Pertama-tama kami panjatkan puji syukur karena Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena semua berkat rahmat dan karunia-Nya, perpustakaan DPR RI hari ini mendapatkan penghargaan sebagai perpustakaan rujukan

”

KAMI BERHARAP LITERASI INI AKAN MENJADI SALAH SATU GERAKAN NASIONAL, SEHINGGA NANTI PERPUSTAKAAN DPR MENJADI SATU INOVATOR DALAM MENINGKATKAN GERAKAN LITERASI NASIONAL. SEHINGGA NANTI MINAT BACA, MINAT BELAJAR DARI PADA MASYARAKAT INI UNTUK DAPAT TERUS DITINGKATKAN.

nasional akreditasi perpustakaan dari Perpustakaan Nasional. Ini merupakan satu prestasi dari kerja keras teman-teman di perpustakaan," ujar Suprihartini kepada **Parlementaria**.

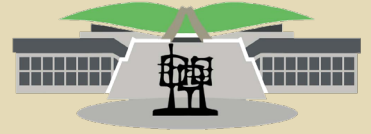
Saat ini, perpustakaan DPR RI telah melakukan banyak transformasi, terlebih transformasi digital. Dirinya menyampaikan bahwa perpustakaan DPR RI sudah melakukan digitalisasi terhadap seluruh koleksi-koleksi yang ada. Selain itu, perpustakaan DPR RI juga sedang fokus untuk melakukan peningkatan koleksi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ke depannya, Plt Deputy Persidangan itu berharap agar perpustakaan DPR RI terus meningkatkan performanya. Salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Menurutnya, hal ini dapat menjadi sebuah stimulus bagi masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan dan menjadi kontributor atas kemajuan dan kecerdasan bangsa.

"Kami berharap literasi ini akan menjadi salah satu gerakan nasional, sehingga nanti perpustakaan DPR menjadi satu inovator dalam meningkatkan gerakan literasi nasional. Sehingga nanti minat baca, minat belajar dari pada masyarakat ini untuk dapat terus ditingkatkan," tutupnya. **adl/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Setjen DPR RI yang digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2023). FOTO: ENO/PDT



Kegiatan bazar yang diselenggarakan P3S dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan di selasar Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2023). FOTO: DEP/PDT



Acara sosialisasi tentang bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2023). FOTO: JKA/PDT

